

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN
DINI: ANALISA TERHADAP PERAN BIDANG KEWASPADAAN BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (BAKESBANGPOL) PROVINSI
DKI JAKARTA DALAM PENCEGAHAN KASUS TAWURAN DI
WILAYAH DKI JAKARTA**

NABILA PUTRI NURCAHYANI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penyelenggaraan kewaspadaan dini terkait pencegahan tawuran melalui peran Bidang Kewaspadaan Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang kemudian dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan oleh George Edwards III (1980). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan kewaspadaan dini telah dilaksanakan oleh Bidang Kewaspadaan melalui peran deteksi dini dan pengelolaan informasi, koordinasi antar pihak, pelaksanaan program pencegahan tawuran, serta pembinaan FKDM. Implementasi kebijakan telah didukung oleh komunikasi yang berlangsung secara jelas dan konsisten, disposisi pelaksana yang menunjukkan komitmen dan perspektif yang selaras dengan tujuan kebijakan, struktur birokrasi yang didukung oleh petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai SOP, serta pembagian kewenangan yang jelas. Pada sumber daya telah didukung oleh ketersediaan informasi dan wewenang, namun belum optimal pada jumlah dan kapasitas staf, dukungan anggaran, serta sarana pendukung berbasis teknologi digital. Penelitian ini juga menemukan tiga tantangan utama, yaitu perlunya adaptasi terhadap perubahan karakteristik tawuran, keterbatasan sumber daya, dan perlunya penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kewaspadaan Dini, Pencegahan Tawuran, Bidang Kewaspadaan Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta.

**POLICY IMPLEMENTATION OF THE EARLY WARNING
SYSTEM: AN ANALYSIS OF THE VIGILANCE DIVISION'S
ROLE AT THE REGIONAL AGENCY FOR NATIONAL UNITY
AND POLITICS (BAKESBANGPOL) OF DKI JAKARTA
PROVINCE IN PREVENTING BRAWL CASES IN DKI JAKARTA**

NABILA PUTRI NURCAHYANI

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the early warning system related to brawl prevention through the role of the Vigilance Division of Bakesbangpol DKI Jakarta Province and to identify the challenges encountered in its implementation. This study employed a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with informants and subsequently analyzed using George Edwards III's (1980) policy implementation theory. The results indicate that the early warning system has been implemented by the Vigilance Division through early detection and information management, inter-agency coordination, the implementation of brawl prevention programs, and the development of the Community Early Warning Forum (FKDM). Policy implementation has been supported by clear and consistent communication, implementers' dispositions characterized by commitment and perspectives aligned with the policy objectives, a bureaucratic structure supported by implementation and technical guidelines serving as Standard Operating Procedures (SOP), and a clear distribution of authority. In terms of resources, implementation has been supported by the availability of information and authority, however it has not yet been optimal in terms of the number and capacity of personnel, budget support, and digital technology-based supporting facilities. The study also identifies three main challenges: the need to adapt to changes in the characteristics of brawls, limited resources, and the need to strengthen public participation in the early warning system.

Keywords: Policy Implementation, Early Warning, Brawl Prevention, Vigilance Division of Bakesbangpol of DKI Jakarta Province.